Kumpulan Esai

YANUAR NUGROHO

MENJAGA NALAR REPUBLIK



Kata Pengantar

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J.

MENJAGA NALAR REPUBLIK

KUMPULAN ESAI

YANUAR NUGROHO

MENJAGA NALAR REPUBLIK

KUMPULAN ESAI

YANUAR NUGROHO

Copyright© 2026, Yanuar Nugroho

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
edisi cetak dan digital
oleh Penerbit Buku Kompas, 2026
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

Kopieditor: Ardelia Karisa
Desain sampul: Emte
Ilustrasi isi: Dok. *Kompas*/Heryunanto,
Didie SW, Supriyanto, Jitet Koestana

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xxii + 338 (360 hlm); 15, x 23 cm
ISBN 978-623-523-965-1
ISBN 978-623-523-964-4 (PDF)
KMN 582612116

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Grafika Mardi Yuana, Bogor

Daftar Isi

KATA PENGANTAR | Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. xi
PROLOG | Mencari Nalar di Tengah Riuh Zaman xvii

BAGIAN SATU |
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1

- Masalah Kota, Masalah Kita 3
- Merencanakan Pembangunan 8
- Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data 12
- Mengelola Talenta Nasional 17
- Visi Sesudah Pandemi 21
- Arah Pembangunan Jangka Panjang 26
- Tentang Satu Masa Depan Nusantara 33
- Kesinambungan Pembangunan 40

BAGIAN DUA |
REFORMASI BIROKRASI
DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 49

- Meremajakan Birokrasi Kita 51
- Menjaga Tata Kelola Pemerintahan 55
- Membangun Kapasitas Negara 60
- Membenahi Tata Kelola 66
- Urgensi Reformasi Birokrasi Jokowi 72
- Pemilu dan Nalar Penyelenggaraan Negara 79

- Tantangan Masa Depan Pemerintahan Prabowo 86
- Fleksibilitas Kerja Birokrasi Kita 93
- Bencana di Sumatra dan Kapasitas Negara 101

BAGIAN TIGA |
TANTANGAN ERA BARU 107

- Ruang Publik: Media, Kuasa, dan *Res Publica* 109
- Refleksi 50 Tahun *Kompas*: Media dan Keadaban Publik 113
- Geoekonomi Digital 117
- Peluang Baru di Era Baru 124
- Membangun Ekosistem Riset di Indonesia 129
- Melawan Korupsi dengan Teknologi 136
- Bersama Hadapi yang Tak Terduga 141
- Tantangan Kelola Riset dan Inovasi 145
- Riset dan Inovasi di Simpang Jalan 149
- Soal Teknis dan Etis Uji Klinis Vaksin TBC 155

BAGIAN KEEMPAT |
DEMOKRASI DAN RUANG SIPIL 161

- Memikirkan Warisan Jokowi 163
- Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil 170
- Perpanjangan Kekuasaan dan Kenegarawanan 177
- Kebangkitan Bangsa 184
- Kriteria Pemimpin Kita 190
- Oposisi dalam Hidup Bernegara 197
- Negeri Sesudah Seratus Hari 205
- Tuan, Jangan Biarkan Reformasi Mati 212
- Matinya Teknokratisme dalam Pragmatisme Politik Prabowo 219
- Jaga Supremasi Sipil 228

BAGIAN KELIMA |
KEWARGAAN DAN KEADABAN PUBLIK 237

- Menyoal Pendidikan di Indonesia 239
- Visi Membangun Manusia 244
- *Pangapti Kamanunggalan miwah Kawangsaan* 251
- Tantangan Merawat Harapan 258
- 2023: Menjaga Nalar, Merawat Harapan 264
- Mengajar dan Meneliti di Negeri Sendiri 271
- Kesetiaan pada Gagasan 279
- Ambruknya Keadaban Publik Kita 286
- Nalar Kebijakan di Hadapan Pengadilan 293
- Keadaban Pemerintahan 300
- Tak Ada Pesta Abadi 307

Sesudah Nalar, Apa yang Tersisa? Sebuah Epilog 314
Sumber Tulisan 319
Indeks 323
Tentang Penulis 337

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J.

Setelah 81 tahun merdeka, Indonesia telah melewati berbagai pengalaman naik dan turun, mulai dari momen-momen yang sangat kritis hingga momen-momen yang memberi semangat. Kendati demikian, Indonesia tetap berdiri teguh meskipun sempat mengalami kegoyahan. Momen ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk sejenak menengok ke belakang dan melakukan refleksi.

Yang jelas dan perlu diketahui adalah bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling majemuk di dunia yang memiliki ratusan budaya, etnik, bahasa, dan orientasi keagamaan. Pertanyannya, bagaimana semua itu bisa bersatu? Jawabannya terletak pada sejarah bahwa kemerdekaan kita bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan yang berdarah. Hingga akhirnya, pada Desember 1949, pihak kolonial Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia yang sebelumnya telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Maka, tidak mengherankan jika dalam perjalanannya Indonesia berkali-kali menghadapi konflik serius. Pada tahun 1947, Musso kembali dari Uni Soviet membawa garis keras baru Moskwa (garis Stanov) yang menginstruksikan partai-partai komunis untuk merebut kekuasaan, hingga pecahlah pemberontakan Madiun tahun 1948 yang memakan banyak korban. Selanjutnya, pada 25 April 1950, Chris Soumokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS), tetapi gagal. Di Jawa Barat, pemberontakan Darul Islam berlangsung selama lebih dari satu dekade sejak 1950 dan menelan banyak nyawa. Menghadapi situasi itu, Bung Karno

merasa persatuan Indonesia hanya dapat dijaga dengan mengganti sistem demokrasi menjadi Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi (Pembesrev) yang berlandaskan ideologi Nasakom. Namun, impian ini kandas akibat pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut memicu reaksi berantai berupa salah satu genosida yang paling mengerikan di abad ke-20 terhadap mereka yang dianggap komunis, sekaligus membuka gerbang era Orde Baru di bawah Soeharto.

Pada tahun 1998, sesudah 32 tahun berkuasa, Soeharto *lengser keprabon* menyusul krisis moneter yang memukul ekonomi nasional dan menjatuhkan jutaan orang ke jurang kemiskinan. Di tengah berbagai konflik daerah yang pecah saat itu, banyak pihak mengkhawatirkan Indonesia akan runtuh seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Akan tetapi, Indonesia nyatanya tidak pecah. Bangsa ini berhasil keluar dari krisisnya, dari kerusuhan-kerusuhan yang menelan banyak korban, dan kembali dengan kondisi yang lebih kuat. Indonesia bahkan berhasil mencapai sesuatu yang sebelumnya, sejak 1945, dielakkan oleh para pemimpin terdahulu: membuat Indonesia betul-betul menjadi demokrasi, memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar, dan tetap berlandaskan Pancasila.

Meski demikian , ada aspek yang masih dinilai kurang berhasil. Tuntutan para mahasiswa yang menumbangkan Orde Baru berbunyi "Berantas KKN!" (Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme!). Sayangnya, tuntutan itu belum sepenuhnya tercapai. Kelompok-kelompok korup warisan Orde Baru hanya mundur sejenak, tidak hilang, dan perlahan menyatakan diri untuk kembali. Demokrasi yang diperjuangkan dengan banyak korban dan penumpahan darah mulai diam-diam digerogoti oleh kekuasaan suatu oligarki yang semakin korup. Banyak dari kita merasa kecewa atas janji Nawacita di era Presiden Joko Widodo (2014-2024) yang tidak terpenuhi. Selain itu, juga mulai muncul pembusukan dari dalam pemerintahan yang diakibatkan oleh korupsi.

Situasi inilah yang dianalisis dan dikomentari oleh Yanuar Nugroho melalui 48 tulisan yang dipublikasikan di Harian *Kompas* sejak 2011. Dengan fokus pada masalah-masalah yang muncul secara aktual, pembaca tidak perlu berputar-putar pada penjelasan latar belakang yang panjang, melainkan langsung disuguhi informasi dan pertimbangan kritis yang tajam dan *to the point*. Melalui tulisan tersebut, pembaca diajak untuk menyadari garis perkembangan serta tantangan serius yang dihadapi bangsa, sekaligus membantu mereka dalam membentuk sikap sendiri terhadap isu tersebut.

Yang menarik, tulisan pertama dalam buku Yanuar ini membahas mengenai kerusuhan, tetapi bukan di Indonesia, melainkan di Inggris tahun 2011! Ia menganalisis fenomena tersebut sebagai praktik politik kuasa (*exercise of political power*) kaum tersingkir. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa jabatan publik strategis untuk pembangunan memerlukan keterampilan teknis di samping pengaruh politis. Hal ini menegaskan bahwa kita memang sedang berada di tengah berbagai tantangan besar.

Selain tulisan tentang kerusuhan dan gerakan warga, Yanuar turut mengangkat proyek raksasa pemerintahan Jokowi 10 tahun lalu, yaitu pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Kalimantan dengan nama baru Ibu Kota Nusantara atau "IKN". Hingga kini, berbagai pertanyaan mendasar terkait rencana tersebut belum terjawab. Yanuar juga menyentuh tantangan peremajaan birokrasi agar aparatur negara berubah dari birokrat yang melayani pejabat di atas mereka menjadi pelayan publik. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kesediaan birokrat, politisi, dan pemimpin untuk menerima kritik. Yanuar menegaskan bahwa kritik itu bukanlah selalu sikap antipemerintah, sembari mengutip pemikiran almarhum B. Herry-Priyono yang menyatakan bahwa sistem yang tidak korup itu memang mungkin terwujud. Sebab, negeri ini tidak akan pernah besar dan disegani jika kualitas dan kinerja birokrasinya tetap seperti saat ini. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh ditinggalkan dalam senyap.

Yanuar pun membahas persoalan di bawah kabinet Prabowo Subianto yang kian membengkak. Munculnya menteri-menteri yang tidak profesional serta penunjukan langsung eselon 1A tanpa seleksi menjadi ancaman bagi prinsip meritokrasi di mana seseorang diberi posisi sesuai dengan kecakapan yang terbukti. Selain itu, keterlibatan militer dalam administrasi sipil semakin terlihat. Lemahnya perlindungan administrasi terhadap masyarakat tampak jelas dalam tragedi Sumatra pada November lalu, di mana negara hadir secara lambat setelah ratusan nyawa melayang. Yanuar menunjuk pada ego sektoral sebagai penyakit lama birokrasi yang masih ada pada pemerintahan saat ini.

Yanuar juga menunjukkan bahwa kelemahan fatal dalam demokrasi kita adalah tidak adanya oposisi. Padahal, oposisi diperlukan untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan cita-cita proklamasi, yakni masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera. Yanuar menyoroti lemahnya tata kelola dan buruknya koordinasi yang membuat pelaksanaan kebijakan tidak efektif karena pemerintah cenderung mudah menggampangkan persoalan. Ia melontarkan pertanyaan reflektif: apakah kita ingin membangun republik kuat yang berpijak pada akal sehat atau membiarkan negeri terombang-ambing dalam improvisasi tanpa kompas penuntun arah dan langkah? Masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi perlu berani bersuara lebih keras kepada DPR dan pemerintah: "Tuan, demi masa depan negeri ini, jangan biarkan reformasi mati! Demi masa depan bangsa, kita harus menuntut kebijakan pembangunan yang waras, adil, dan berbasis bukti."

Tidak berhenti sampai persoalan lemahnya tata kelola, Yanuar menyingkap peristiwa 28 Agustus 2025, menyusul insiden kendaraan Brimob yang melindas Affan Kurniawan, menegaskan bahwa ujian mendasar demokrasi kita adalah apakah supremasi sipil dapat bertahan atau kita justru terjerumus ke dalam *authoritarian resilience*. Supremasi sipil, oleh karena itu, merupakan prasyarat moral dan konstitusional agar negara tetap berada di jalur demokrasi.

Dalam buku ini, Yanuar Nugroho turut menegaskan pentingnya reformasi pendidikan tinggi demi mewujudkan visi Indonesia 2045. Menurutnya, penanda bahwa Indonesia menjadi negara maju adalah ketika para akademisi kita bisa merasa bangga mengajar dan meneliti di negeri sendiri. Selain itu, penulis ini juga menganggap penting catatan Yanuar mengenai kasus Tom Lembong yang—sudah tepat—akhirnya dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Sangat tidak masuk akal bahwa seorang pejabat dipenjara karena ia membuat kebijakan demi mengatasi persoalan nyata tanpa mencari keuntungan apa pun bagi dirinya sendiri, apalagi di tengah maraknya korupsi dan pencurian yang terjadi di sekitarnya.

Isu krusial lain yang diangkat Yanuar adalah pembatasan kebebasan wartawan untuk melapor dan mengkritik. Wartawan yang kritis terhadap pemerintah kini terancam dibatasi aksesnya dengan dalih menjaga kerawanan, bahkan warga tak boleh melaporkan ketidakberesan agar tak dianggap meresahkan. Gawat kalau kebebasan informasi masyarakat dibatasi oleh mereka yang memiliki kasus-kasus korupsi. Bila terus berlanjut, demokrasi kita semakin tinggal hanya prosedural basa-basi tanpa substansi. Oleh karena itu, untuk memperhatikan secara kritis para politisi, kita perlu peningkatan literasi politik. Sebab, Indonesia harus berani menegaskan kembali orientasi kebijakan publik di mana pemegang kedaulatan itu rakyat, bukan elite politik atau oligarki.

Dalam tulisan terakhirnya, Yanuar merangkum apa yang merupakan tantangan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janji Asta Cita, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR), *Food and Energy Estate* sebagai strategi swasembada pangan dan energi, janji 19 juta lapangan kerja, perluasan bansos, hingga perekonomian nasional yang tumbuh tinggi. Seperti ditegaskan Yanuar: "Tak ada yang salah dengan janji-janji ini. Masalahnya adalah perwujudannya". Perwujudan ini menurutnya serba tergesa, tanpa rencana matang, implementasinya asal jalan, dan menghindari evaluasi. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan berpotensi berantakan, seperti penghentian pemberian makanan tambahan untuk balita dan lansia demi program MBG yang

makanannya disedikan oleh unsur pabrikan (*ultra processed food*), bergula, berlemak tinggi, dan justru tidak sehat.

Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sederhana: karena semua dilakukan tanpa pembicaraan, tanpa melibatkan ahli, seperti belum pernah mendengarkan prinsip tata kelola. Dampaknya, praktik korupsi dan penyuapan semakin meluas di setiap tingkat dan ruang hidup masyarakat. Penyelenggaraan negara yang terkesan tertutup ini akan menghambat kemajuan ekonomi dan menciptakan risiko sosial yang tinggi bagi jutaan keluarga rentan miskin atau menuju kelas menengah. Di bidang politik yang cenderung rawan gesekan, langkah-langkah seperti wacana pilkada tidak langsung dan kembalinya peraturan ke UUD 1945 asli dinilai sebagai kemunduran. Jangan-jangan, tata kelola pemerintahan yang berantakan ini dengan sengaja membawa kesan bahwa apa pun yang dianggap prioritas presiden bisa dilakukan, meskipun layanan publik akan terganggu. Yanuar memperingatkan adanya kemungkinan krisis multidimensi tahun ini jika layanan publik terganggu demi prioritas presiden semata.

Sebagai penutup, Yanuar Nugroho mengakhiri dengan menyerukan agar masyarakat lebih bijak dan waspada. Para akademisi dan intelektual ditantang untuk tidak takut menyampaikan kritik terbuka. Media juga memikul tanggung jawab besar pada tahun 2026. Kemudian, bagi para politisi, ujian terbesarnya adalah menempatkan kepentingan publik di atas kalkulasi elektoral jangka pendek. Parpol mesti menjembatani aspirasi warga dan kebijakan negara, bukan menjadi mesin mobilisasi dan pemburu renten. Apalagi, menurut Yanuar, tahun 2026 adalah tahun ujian bagi bangsa antara mengejar ambisi kuasa dan melindas akal sehat atau memilih jalan yang jujur, tata kelola yang bersih, dan warga yang berani bersuara. Yanuar mengharapkan bahwa selama masih ada warga yang mau peduli, akademisi yang berani, dan birokrat yang lurus, media yang teguh, dan pemimpin politik yang mau mendengar, selalu ada peluang untuk memperbaiki arah bangsa di tahun yang penuh kewaspadaan ini.

Tak perlu ada komentar. Itulah tantangan kita. Mari kita lakukan! ✦

- Tantangan Masa Depan Peme
- Fleksibilitas Kerja Birokrasi K
- Bencana di Sumatra dan Kapa

BAGIAN TIGA |
TANTANGAN ERA BARU .....

- Ruang Publik: Media, Kuasa, d
- Refleksi 50 Tahun *Kompas*: M
- Geoekonomi Digital.....
- Peluang Baru di Era Baru .....
- Membangun Ekosistem Riset
- Melawan Korupsi dengan Tek
- Bersama Hadapi yang Tak Ter
- Tantangan Kelola Riset dan In
- Riset dan Inovasi di Simpang
- Soal Teknis dan Etis Uji Klinis

kebebasan substantif warganya menjadi makin luas. Negara yang 'bernalar' adalah yang menempatkan kebijakan sebagai alat memperluas dan meningkatkan kemampuan (*capability*) warganya untuk hidup lebih bermartabat, dan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan dan besaran ekonomi makro. Ini diingatkan Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999). Dalam pandangan Sen, pertumbuhan ekonomi yang tak disertai mobilitas sosial dan akses yang adil itu semu. Ini catatan penting.

Catatan penting lainnya adalah tentang cara berpikir negara yang tentu menyangkut perkara rasionalitas kebijakan yang dibuatnya. Jürgen Habermas (1996) menekankan pentingnya komunikasi publik yang rasional sebagai landasan legitimasi politik dalam hidup bernegara. Tanpa proses deliberatif yang sehat, keputusan negara mudah terpeleset, bahkan terpelanting, menjadi produk kompromi kekuasaan dan bukan hasil pertimbangan pemikiran—apalagi nalar publik. Apa yang disebut Habermas sebagai *deliberative democracy* ini rasanya menjadi makin penting di era disrupsi digital hari-hari ini. Karena saat informasi membanjir tapi kebisingan (*noise*) dan dengungan (*buzz*) lebih dominan dari argumentasi, tantangan menjaga rasionalitas ini makin berat.

Di atas semuanya, negara dan pemerintahan harus mampu menjalankan dan mewujudkan intensi kebijakannya lewat berbagai eksekusi keputusan yang diambilnya. Dan itu mesti dijalankan dengan konsisten, adil, dan akuntabel. Itulah inti gagasan kapasitas negara (*state capacity*). Diskursus tentang *state capacity* ini dibahas Francis Fukuyama (*Political Order and Political Decay*, 2014) dan dipertegas dengan pendekatan kontemporer administrasi pemerintahan: *delivery*—yakni kemampuan menjalankan atau mewujudkan pembangunan yang hasilnya bermakna (Michael Barber, *Instruction to Deliver*, 2007). Kedua diskursus ini, serta berbagai studi kontemporer tentang efektivitas negara, menunjukkan gamblang: niat baik saja tidak cukup—butuh kemampuan dan kapasitas negara untuk menerjemahkan visi politik menjadi pembangunan yang hasilnya berguna bagi warga. Tanpa kapasitas institusional kuat, visi hanya jadi retorika.

Karena itu, pertanyaan mengenai bagaimana negara mesti berpikir hakikatnya adalah pertanyaan tentang etika, kapasitas, dan sekaligus arah sejarah. Di jantung perkara, yang dituntut adalah kemampuan setia pada visi yang melandasi arah pembangunan, khususnya tentang keadilan dan hak warga. Visi ini mesti didukung disiplin teknokratis dan peran kelembagaan pemerintahan. Tanpa itu, negara akan gampang terombang-ambing antara populisme jangka pendek dan birokratisme yang beku.

≈

Dalam renungan pemikiran di atas itulah buku ini diupayakan tampil bukan sebagai kumpulan opini yang berdiri sendiri-sendiri. Buku ini dimaksudkan sebagai rekaman perjalanan gagasan tentang pembangunan, tata kelola, demokrasi, kewargaan, dan bagaimana kita merencanakan masa depan. Selain itu, bagaimana kita sering gagal karena tak mau belajar dari kenyataan.

Lima bagian dalam buku ini mencoba merekam lapisan-lapisan persoalan tersebut.

Bagian *pertama*, Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, bicara tentang fondasi: bagaimana pembangunan mesti dipahami dan direncanakan. Dari persoalan kota dan eksklusi sosial, satu data, pengelolaan talenta nasional, hingga arah pembangunan jangka panjang dan visi pasca-pandemi. Bagian ini menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi pilihan moral dan institusional. Tanpa cara berpikir yang 'jejeg' atau tepat, pembangunan hanya menjadi rutinitas teknokratis yang kehilangan arah.

Bagian *kedua*, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, masuk lebih dalam ke jantung negara bekerja: kapasitas, integritas, dan konsistensi kebijakan. Bagian ini membahas peremajaan birokrasi, fleksibilitas kerja aparatur, kesinambungan pembangunan, hingga tantangan pemerintahan baru. Pesan utamanya sederhana tetapi semoga mendasar: negara tidak pernah lebih baik dari kualitas tata kelolanya. Kapasitas

negara bukan abstraksi; ia nyata dalam kemampuan merumuskan kebijakan, menjalankan program pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik.

Bagian *ketiga*, Tantangan Era Baru, mencoba memotret lanskap yang tengah berubah: geoekonomi digital, ekosistem riset, teknologi, inovasi, hingga persoalan etis yang menyertainya. Dunia memang tak lagi bergerak linear. Disrupsi menjadi norma. Dalam konteks itu, negara dan masyarakat dituntut bukan hanya untuk mampu adaptif, tetapi juga reflektif—mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan kompas etika.

Bagian *keempat*, Demokrasi dan Ruang Sipil, merekam kegelisahan tentang arah republik. Warisan kekuasaan, supremasi sipil, oposisi, teknokratisme yang memudar, hingga bahaya perpanjangan kuasa—semua menjadi bagian percakapan tentang kualitas demokrasi kita. Demokrasi tak runtuh dalam semalam. Ia terkikis pelan-pelan oleh pembiaran, pragmatisme, dan kompromi yang tak lagi punya batas.

Bagian terakhir, Kewargaan dan Keadaban Publik, kembali melihat manusia sebagai subjek pembangunan. Pendidikan, harapan, kesetiaan pada gagasan, keadaban pemerintahan, hingga refleksi tentang pesta politik dan kenyataan sesudahnya—seluruhnya berbicara tentang tanggung jawab moral warga dan pemimpin. Negara yang kuat tak hanya ditopang institusi, tetapi juga oleh keadaban publik.

Jika diperas satu pesan utama semua esai ini, barangkali ini: pembangunan tanpa nalar akan salah arah; kekuasaan tanpa etika akan merusak; dan kemajuan tanpa keadaban akan hampa.

~

Esai-esai ini tidak menawarkan resep instan. Namun saya harap bisa menjadi sedikit upaya menjaga percakapan tetap rasional di tengah kecenderungan menyederhanakan persoalan.

Ada kritik, ada harapan. Ada kegelisahan, tetapi juga keyakinan bahwa republik ini selalu punya kemungkinan diperbaiki.

Sebagian tulisan mungkin lahir dari momen yang sudah lewat. Namun, persoalan yang diangkatnya belum selesai. Ketimpangan kota, lemahnya tata kelola, ketergantungan pada sumber daya alam, stagnasi inovasi, kemunduran demokrasi—semuanya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama saat ini.

Karena itu, buku ini dapat dibaca dengan dua cara. *Satu*, sebagai arsip pemikiran atas berbagai peristiwa. *Dua*, sebagai peta untuk memahami bagaimana kebijakan, institusi, dan warga saling bertaut dalam menentukan arah masa depan hidup bersama kita.

Pada akhirnya, republik ini memang tidak dibentuk oleh peristiwa besar semata, tetapi juga oleh kualitas keputusan-keputusan sehari-hari—di ruang rapat kantor pemerintah, di ruang kelas, di media, dan di ruang publik tempat kita berdialog. Buku ini, harapan saya, bisa menjadi bagian kecil dari upaya menjaga kualitas percakapan itu.

Semoga ia membantu kita berpikir sedikit lebih jernih, bersikap sedikit lebih adil, dan merencanakan masa depan dengan sedikit lebih bersungguh-sungguh.

Selamat membaca. ✦

Yogyakarta, Februari 2026

Yanuar Nugroho

Buku ini menghimpun esai-esai Yanuar Nugroho yang dimuat di Harian *Kompas* dalam lebih dari satu dekade, merekam pergulatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga arah demokrasi. Berangkat dari kegelisahan bagaimana negara mesti berpikir dan bertindak secara waras, adil, dan bertanggung jawab, tulisan-tulisan ini menawarkan refleksi kritis atas kebijakan publik, kapasitas institusi, serta relasi antara negara dan warga.

Disusun dalam lima bagian, buku ini menelusuri fondasi pembangunan, reformasi birokrasi, disrupsi teknologi, tantangan demokrasi, hingga keadaban publik sebagai penopang Republik. Dengan pendekatan reflektif dan berbasis pengalaman langsung di lingkar kebijakan, Yanuar mengajak pembaca melihat bahwa persoalan Indonesia bukan sekadar lemah atau bahkan tiadanya visi, melainkan rendahnya konsistensi menjaga nalar dan etika dalam penyelenggaraan negara.

Lebih dari sekadar kumpulan tulisan, buku ini adalah ajakan untuk berpikir lebih jernih, bersikap lebih kritis, dan tetap menjaga harapan: bahwa masa depan Indonesia dapat terus diperbaiki melalui nalar, partisipasi, dan tanggung jawab bersama.



YANUAR NUGROHO dikenal sebagai salah satu figur yang konsisten mendorong penggunaan bukti (*evidence*) dan nalar dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Karier akademiknya berkembang di University of Manchester, tempat ia meraih doktoral dalam bidang inovasi dan perubahan sosial, serta berkiprah sebagai peneliti dan pengajar. Sekembali ke Indonesia, Yanuar bergabung dalam pemerintahan dan terlibat langsung dalam proses kebijakan di tingkat tertinggi. Buku ini merupakan bagian dari upaya merekam refleksi atas pengalaman, gagasan, dan pergulatan panjang dalam memahami bagaimana negara seharusnya berpikir dan bertindak: dengan nalar, etika, dan tanggung jawab terhadap masa depan bersama.

KOMPAS
PENERBIT BUKU
Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 | Telp. (021) 5347710 ext. 41225
buku@kompas.com
@bukuKOMPAS
@bukuKOMPAS
Penerbit Buku Kompas

POLITIC
15+
582612116
Harga P. Jawa Rp169.000

9 786235 239651

ISBN 978-623-523-965-1
ISBN 978-623-523-964-4 (PDF)